

tengah masa jabatan. Hal ini menjadikan DPRD seakan menjadi penguasa tunggal yang menentukan nasib kepala daerah. Keadaan ini tentu berdampak pada munculnya konflik politik lokal antara kepala daerah dan anggota DPRD bersama pendukung masing-masing. Dengan Pilkada Langsung diharapkan fenomena di atas dapat dihindari karena para kepala daerah dapat melaksanakan tugasnya selama masa jabatannya belum habis tanpa harus bergantung kepada DPRD.

Keempat, lebih meningkatkan kualitas partisipasi serta kedaulatan rakyat di satu pihak dan keterwakilan elit di pihak lain, karena rakyat menurut Eep Saifullah Fattah diberikan kepercayaan untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan siapa yang pantas menjadi pemimpinnya, bukan sebagai identitas statistik yang pasif. (Kompas, 2005: 40)

Persoalannya kemudian adalah Apakah Pilkada langsung mampu menghasilkan pemimpin yang transformatif? dan apakah Pilkada langsung mampu membangun masyarakat otonom yang mampu berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Pilkada Langsung

Pilkada adalah Pemilu (Ramlan Surbakti, 2005: 4). Pelaksanaan Pemilu (Pilkada) di Indonesia belum menggambarkan bahwa Sistem politik yang di anut adalah sistem politik Demokratis, hal ini bisa dilihat dari tidak hanya negara-negara yang menganut sistem demokratis yang melaksanakan pemilu. Negara-negara yang menganut ini masih belum cukup kuat untuk menggambarkan bahwa negara Indonesia menganut sistem politik demokrasi. Ini bisa dilihat dari semua sistem politik liberal, sistem komunis, sistem otoriter juga melaksanakan Pemilu. Pemilu dalam negara-negara otoriter tentu hanya sebagai alat legitimasi penguasa atau alat untuk melestarikan status-quo. Pemilu semacam ini tidak dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan politik yang baik.

Pemilu yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi saja yang memungkinkan sebagai wahana pendidikan politik rakyat atau sebagai wahana terpilihnya pemimpin yang kompeten sekaligus terwujudnya pemberdayaan politik rakyat. Syarat Pemilu yang demokratis adalah Pemilu yang dijalankan secara *free* dan *fair*

Parpol secara otonom untuk membuat regulasi tanpa intervensi dari manapun; (2) menghilangkan berbagai aturan yang bisa membatasi kelompok-kelompok tertentu baik karena ideologi maupun orientasi kebijakan untuk terlibat dalam proses pemilihan. (Asfar, 2002: 12)

Kepemimpinan

Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan tidaklah bisa dilepaskan dari kualitas pemimpinnya. Baik organisasi privat terlebih organisasi publik pemimpin merupakan suatu keniscayaan. Pentingnya seorang pemimpin paling tidak karena *pertama*, sebagai penentu arah yang hendak ditempuh organisasi usaha pencapaian tujuan dan berbagai sarannya. *Kedua*, mediator, khususnya dalam mengatasi konflik yang mungkin timbul antara individu dalam satu kelompok kerja dan antara kelompok kerja yang terdapat dalam organisasi yang dipimpinnya. *Ketika*, integrator, yang rasional dan obyektif. *Keempat*, komunikator yang efektif dan sebagai wakil dari sebuah organisasi ketika berhubungan dengan pihak luar.

Adanya pimpinan dalam suatu organisasi tidaklah cukup untuk mengantarkan sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya. Faktor yang lebih

penting adalah kompetensi pimpinannya, lebih-lebih organisasi sektor publik. Karena sektor publik tidak sesederhana dan sejelas sektor privat. Sektor publik disamping lebih luas cakupannya, juga tujuan yang diemban tidak sekongkrit sektor privat. Kalau sektor privat tujuannya jelas, untuk mendapatkan keuntungan (efisiensi) yang sebesar-besarnya, sedang sektor publik disamping memandang perlunya efisiensi dan efektivitas maka juga tetap menjaga nilai-nilai kemanusiaan, seperti keadilan, kedaulatan rakyat, perlindungan hak-hak asasi manusia, dan akuntabilitas.

Nilai-nilai tersebut hampir belum dapat direalisasikan oleh organisasi publik lebih negara-negara dunia ke tiga. Persoalannya sekarang adalah mengapa nilai-nilai efisiensi, efektifitas, humanisme seperti keadilan, kedaulatan rakyat, perlindungan hak-hak asasi manusia dan akuntabilitas sulit terealisasikan? Apa sebenarnya problem organisasi publik dan apa kendala-kendalanya?

Inu Kencana Syafi'i mengidentifikasi problem organisasi publik dalam enam bagian yaitu masih suburnya budaya feodalisme, instruksional, loyalitas pada atasan,

karena paling tidak memiliki makna (1) sebagai motivasi para pegawai untuk bekerja secara tekun dan giat, (2) sebagai ekspresi emosi pimpinan, (3) sebagai penyampaian informasi, dan (4) sebagai pengendalian perilaku pegawai.

Kepemimpinan Komunikatif

Kepemimpinan komunikatif akan lahir dari gaya kepemimpinan yang demokratis, dimana pemimpin yang demokratis akan selalu berusaha membangkitkan setiap anggota organisasi untuk berperan aktif tujuan organisasi. untuk membangkitkan partisipasi aktif anggota organisasi dalam mencaapai tujuan seorang pemimpin harus mempunyai kompetensi kepemimpinan terutama kompetensi komunikasi merupakan kompetensi dasar seorang pemimpin karena akan memiliki makna sebagai motivator atau penggerak para pegawai untuk bekerja secara tekun dan giat.

Ide dan gagasan pemimpin hanya bisa disampaikan kepada anggota organisasi melalui komunikasi yang efektif untuk itu seorang pemimpin harus juga sebagai komunikator yang baik disamping itu juga kemampuan berkomunikasi bagi pemimpin merupakan ekspresi emosi pimpinan, sebagai bentuk penyampaian informasi

dan ide serta gagasan , juga berfungsi sebagai pengendalian perilaku pegawai.

Pemimpin yang komunikatif akan mampu mengerakkn anggota organisasi untuk mencapai tujuan dengan efektif dimana anggota organisasi tidak pernah merasa dipaksa atau diperintah oleh atasan atau pemimpin, karena pemimpin mampu memerankan komunikasi yang baik sebagai seorang komunikator dengan tehnik persuasi yang baik.

Dalam memerankan komunikator yang baik seorang pemimpin akan mampu menjadi *satu* One Of Us yang berarti pemimpin adalah salah satu dari kita yang mampu mencerminkan perilaku dan watak dari kelompok atau organisasinya. *Kedua* The Most Of Us dimana pemimpin bukan hanya bagian dari kelompoknya tetapi pemimpin juga harus mampu membawa anggota kelompok untuk mentaati aturan dan norma yang ada. *Ketiga* The Great Of Man bahwa pemimpin adalah orang yang mempunyai kewibawaan dan dan kehormatan yang besar di depan para anggota kelompoknya.

Pemimpin organisasi atau kelompok mencapai ketiga hal tersebut jika pemimpin mampu menunjukkan aktifitas kepemimpinannya melalui kemampuan berkomunikasi yang baik,

dimana pemimpin menunjukkan kepada anggotanya dengan komunikasi simbolik dalam hal ini adalah teladan dalam menjaga nilai dan norma kelompoknya serta dalam mengerakkan anggota dalam mencapai tujuan, sehingga anggota tidak merasa diperintah oleh atasan atau pemimpin dalam melakukan aktifitas organisasi

Pemimpin organisasi juga harus mampu melakukan komunikasi persuasif agar anggota meyakini bahwa pemimpin berasal dari bagian kelompok yang merupakan bagian dari kelompok serta merupakan orang besar dan berwibawa dalam kelompok.

Penutup

Pilkada langsung merupakan amanat dari uu, dan merupakan perwujudan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Demokrasi diyakini dan dipercaya merupakan sistem politik terbaik yang sudah diakui oleh negara negara di Dunia. Dengan pilkada langsung yang diselenggarakan ditingkat daerah dalam rangka mencari pemimpin daerah yang berkompeten, meskipun banyak tantangan dan hambatan dalam implementasinya.

Dengan berbagai permasalahan dan tantangan Pilkada langsung parpol harus benar-benar melaksanakan rekrutmen terbuka karena ini merupakan salah satu syarat tegaknya prinsip demokrasi. Rekrutmen bersifat terbuka, artinya siapa saja warga negara yang memiliki kualitas tanpa pandang bulu, mempunyai hak sama untuk menjadi bakal calon kepala daerah meskipun kurang memiliki modal. Tidak seperti sekarang dimana calon-calon kepala daerah di dominasi oleh orang-orang yang memiliki modal besar, tetapi ukuran kualitas dinomor belakangan.

Konsekuensinya Parpol harus memfasilitasi calon kepala daerah untuk mendapatkan dana. Ini yang terjadi di Amerika Serikat. Ketika Hillary Rodham Clinton maju sebagai senator, pencarian dana dimotori dan difasilitasi oleh Parpol sehingga calon senator tidak usah mengeluarkan modal yang harus dikembalikan saat meraih jabatan.

Proses ini cukup penting, disamping mewujudkan *right to vote and to be candidate* secara adil terciptanya Pemilu yang kompetitif juga potensial mencegah intervensi elit partai (Atas Nama Dewan Pengurus Pusat) dalam menentukan pasangan calon kepala daerah. Langkah ini kiranya cukup

mendesak karena yang kita cemas adalah kalau ada yang berminat menjadi kepala daerah dan kebetulan mempunyai modal yang cukup maka mereka cukup mendekati DPP partai tanpa harus “berkeringat” di daerah.

Bukan rahasia negara ini masih sangat minim pemimpin publik yang kompeten. Mungkin krisis bangsa ini yang sampai sekarang tidak kunjung reda ini salah satu faktor yang terpenting adalah bangsa ini masih belum memiliki pemimpin publik yang kompeten. Dari tujuh kompetensi di atas yakni kompetensi manage diri sendiri, manage komunikasi, manage kemajemukan, manage etika, kompetensi manage tim, manage keragaman budaya, dan kompetensi manage perubahan belum dimiliki secara maksimal oleh putra-putra bangsa Indonesia. Lebih-lebih manage etika dan manage komunikasi masih menjadi masalah yang serius. Moral pemimpin publik masih sangat rendah dibuktikan dengan praktek korupsi yang merajalela. Pemimpin publik masih terlihat lebih mementingkan kepentingan pribadi dan golongan sehingga akar masalah seperti kemiskinan, pengangguran, konflik, kesenjangan sosial tidak mengalami

perubahan kualitas hidup yang signifikan.

Persoalannya sekarang adalah bagaimana strategi menghasilkan pemimpin publik yang kompeten? Bangsa ini telah sepakat memilih dan menerapkan sistem politik demokratis. Mungkinkah sistem politik demokratis mampu menghasilkan pemimpin publik yang kompeten? Bukankah pemimpin publik dipilih langsung oleh rakyat? Apakah ada korelasi yang signifikan antara kehendak rakyat dengan kompetensi seorang pemimpin publik? Dalam iklim demokrasi seperti sekarang bagaimana cara memilih pemimpin yang kompeten?

Ini adalah masalah yang perlu diskusi lebih lanjut, tetapi paling tidak untuk menghasilkan pemimpin publik non-politis yang kompeten dan komunikatif di dalam pemerintahan daerah yang mendesak yang harus dilakukan adalah reformasi sistem rekrutmen. Sebuah sistem rekrutmen yang transparan (terbuka), mengedepankan kemampuan pemimpin yang memiliki kemampuan kognitif yang mendalam dan skill bukan karena lamanya kerja.

Pada sisi lain untuk menghasilkan pemimpin publik yang kompeten dan

- Administrasi*, Puskodak FISIP
Undip, Semarang.
- Setiyono, Budi, 2005, *Accountability and Ethic Management Morallity In Public Sector*, Bahan Mata Kuliah Manajemen Publik, Magister Ilmu Politik, Undip Semarang.
- Siagian, Shondang, PS, 1999, *Teori dan Praktik Kepemimpinan*, Rineka Cipta Jakarta.
- Silitonga, Bonget. 2005. *Pilkada dan Pembajakan Demokrasi*. Kompas: Jakarta.
- Surbakti, Ramlan. 2005. *Pilkadal adalah Pemilu*. Kompas. Jakarta.
- Syafi, Inu Kencana, 2006, *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung
- Tangkilisan, Hessel Nogi S, 2005, *Manajemen Publik*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV.
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
- Walker, Michael. 1995. *Toward a Global Civil Society*. Providen RI, Bergham Books.
- Warella, 2005, *Kompetensi Pimpinan Publik*, Bahan Mata Kuliah Manajemen Publik, Magister Ilmu Politik, Undip Semarang.